



Article Informations
Corresponding Email:
6211181278firdahusna@gmail.com

Received: 26/08/2024; Accepted:
07/02/2025; Published: 07/02/2025

DIPLOMASI INDONESIA DALAM MEMPERJUANGKAN EKSPOR CRUDE PALM OIL (CPO) KE PASAR UNI EROPA ATAS MUNCULNYA RESOLUSI KELAPA SAWIT DAN DEFORESTASI HUJAN PERIODE 2016-2018

Firda Husna¹⁾, Iing Nurdin²⁾, Nala Nourma Nastiti³⁾

^{1,2,3)} Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Pada Tahun 2017, Parlemen Uni Eropa Mengusulkan kepada Komisi Eropa untuk mengambil langkah penghentian penggunaan minyak sawit pada produksi biofuel di Uni Eropa untuk tahun 2020. Usulan ini tertuang dalam resolusi bertajuk "*Palm Oil and Deforestation of Rainforests*". Usulan dalam resolusi diiringi dengan pernyataan dari Uni Eropa dalam resolusi tersebut jika industri kelapa sawit telah menjadi penyumbang utama terbesar atas deforestasi global yang terjadi. Karena pada tahun 2015, kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia, dinilai Uni Eropa atas pembukaan lahan kelapa sawit. Kelapa sawit juga disinggung oleh Uni Eropa telah mencerminkan pelanggaran atas hak asasi kemanusiaan, yakni mempekerjakan anak di bawah umur untuk dieksploitasi bekerja pada industri ini. Uni Eropa menyarankan untuk mengganti penggunaan minyak sawit dengan minyak bunga matahari dan minyak kanola. Kedua minyak nabati ini, merupakan minyak nabati utama yang diproduksi negara-negara Uni Eropa. Sehingga Pemerintah Indonesia menilai resolusi ini mencerminkan tindakan diskriminatif terhadap kelapa sawit. Dengan demikian, munculnya resolusi ini, mendorong Pemerintah Indonesia untuk melakukan upaya diplomasi dalam memperjuangkan ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) ke Uni Eropa atas munculnya resolusi *Palm Oil and Deforestation of Rainforests*.

Kata Kunci : Kelapa Sawit, Diplomasi, Indonesia, Ekspor, *Crude Palm Oil* (CPO), Uni Eropa.

Abstract

In 2017, the European Union Parliament proposed to the European Commission to take steps to stop the use of palm oil in biofuel production in the European Union by

2020. This proposal was contained in a resolution entitled “Palm Oil and Deforestation of Rainforests”. The proposal in the resolution was accompanied by a statement from the European Union in the resolution, that the palm oil industry had become the largest main contributor to global deforestation. Because in 2015, the forest fires that occurred in Indonesia were assessed by the European Union for opening the palm oil land. Palm oil is also mentioned by the European Union as reflecting the violations of human rights, namely employing underage children to be exploited to work in this industry. The European Union recommends to replace the use of palm oil with sunflower oil and canola oil. These two vegetable oils are the main vegetable oils that produced by European Union countries. Indonesian government considered this resolution as a discriminative actions against palm oil. Thus, the emergence of this resolution encouraged the Indonesian Government to make diplomatic efforts to fight for Crude Palm Oil (CPO) exports to the European Union following the emergence of the Palm Oil and Deforestation of Rainforests resolution.

Keywords : Palm Oil, Diplomacy, Indonesia, Exports, Crude Palm Oil (CPO), European Union.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang terkenal akan keanekaragaman hayati dan sumber daya alamnya. Sebagian besar penduduk Indonesia bekerja pada sektor pertanian dan mengandalkannya sebagai sumber mata pencaharian.¹ Sektor pertanian berperan penting sebagai sumber utama pangan dan penopang dalam meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara. Salah satu sub-sektor perkebunan yang memegang peranan penting dalam perekonomian nasional ialah kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi andalan bagi ekspor non-migas yang berperan secara strategis sebagai penghasil devisa negara di luar minyak dan gas bumi.² Minyak kelapa sawit mentah atau *Crude Palm Oil* (CPO) merupakan salah satu jenis minyak nabati yang dihasilkan dari pengolahan kelapa sawit. Minyak kelapa sawit mentah sendiri memiliki warna kemerah-merahan serta diperoleh melalui hasil ekstraksi (pemisahan) dari daging buah kelapa sawit.³

¹ Kompas, “Indonesia sebagai Negara Agraris Apa Artinya?”, (12 Desember 2019) internet, 20 April 2022, <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/12/172322669/indonesia-sebagai-negara-agraris-apa-artinya?page=all>.

² Siti Masruroh, “Kepentingan Amerika Serikat Menolak Impor CPO (*Crude Palm Oil*) Dari Indonesia Tahun 2012,” *JOM FISIP*. Vol. 4 No.2 (2017) 2.

³ PT. Tunas Harapan Sawit, “Minyak Kelapa Sawit”, (t.tahun) internet, 20 April 2022, <https://tunasharapansawit.com/id/product/minyak-kelapa->

Pengajuan penghentian penggunaan minyak kelapa sawit mentah ini pada program biodiesel di resolusi tersebut didasarkan atas tuduhan awal Uni Eropa yang menyoroiti dan menilai kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2015 dan kerusakan parah di Kalimantan menjadi faktor penyebab kebakaran hutan tersebut untuk membuka lahan perkebunan sawit.⁸ Atas fenomena tersebut, Indonesia dikatakan UE telah menjadi negara terbesar yang menyebabkan pemanasan global di bumi.

Dalam resolusi tersebut juga dikatakan bahwa kebakaran di Indonesia disebabkan oleh pembukaan lahan untuk perkebunan sawit dan penggunaan pertanian lainnya, di mana 52% kebakaran di Indonesia pada tahun 2015 terjadi di lahan gambut kaya karbon, hingga menjadikan negara ini penyumbang pemanasan global terbesar di bumi.⁹ Uni Eropa juga menilai, sebagian besar produksi minyak kelapa sawit telah melanggar hak asasi manusia dan standar sosial yang memadai. Uni Eropa melayangkan tuduhan dan catatan negatif lainnya ke negara-negara produsen kelapa sawit dan menilai industri tersebut kerap menggunakan pekerja anak untuk dieksploitasi hingga menimbulkan banyak konflik lahan di antara masyarakat lokal dengan masyarakat adat setempat hingga adanya dan permasalahan korupsi.¹⁰ UE memperkirakan di tahun 2050 mendatang, permintaan minyak sawit akan terus meningkat dua kali lipat, ditambah luas lahan perkebunan kelapa sawit yang makin bertambah diyakini akan menyebabkan kerusakan lingkungan lebih lanjut.¹¹ Hingga akhirnya, Uni Eropa mengambil langkah lebih lanjut mengurangi deforestasi pada tahun 2020.

International negotiation (negosiasi internasional) , dikemukakan oleh Hall Gardner sebagai sebuah proses dialog berbasis kekuasaan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan, serta menyelesaikan

⁸ *Ibid.*, poin f

⁹ *Ibid.*, poin h.

¹⁰ *Ibid.*, poin a-zz.

¹¹ *Ibid.*, poin n.

perselisihan tertentu secara menyeluruh demi kepuasan semua pihak. Ditujukan untuk membatasi atau meminimalkan ketegangan dan perselisihan sebanyak mungkin tanpa mengubah *status quo* atau hubungan kekuasaan, nilai-nilai dan kepentingan di antara para pihak yang bersengketa.¹² Bayne dan Woolcock mengklasifikasikan negosiasi internasional dapat dijalankan dalam beberapa tingkatan. Di antaranya yakni *bilateral* (diplomasi melibatkan kedua negara), *regional* (diplomasi dilakukan dengan negara-negara yang berada dalam suatu kawasan tertentu atau dengan negara-negara tetangga, misalnya diplomasi dengan negara-negara tetangga seperti Uni Eropa maupun ASEAN), maupun *multilateral* (diplomasi melibatkan tiga atau lebih negara).¹³

Adapun diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam memperjuangkan ekspor CPO ke pasar Uni Eropa ialah dengan menggunakan jalur diplomasi ekonomi. Bayne dan Woolcock menambahkan, dalam diplomasi ekonomi, para elit politik memiliki tanggung jawab yang besar memastikan proses pengambilan keputusan dalam diplomasi ekonomi dapat berdampak positif terhadap meningkatnya kesejahteraan ekonomi di tengah globalisasi yang kian maju. Menurut Maaike Okano – Heijmans ada 3 jalur yang dapat dimanfaatkan pemerintah dalam mengadopsi diplomasi ekonomi guna mengembangkan hubungan yang lebih kuat dengan para pihak, maka pemerintah dapat menggunakan tiga jalur seperti diplomasi perdagangan, diplomasi komersial dan kerja sama pembangunan.¹⁴ Diplomasi perdagangan terdiri dari aktivitas negosiasi di antara 2 atau lebih negara untuk mendukung transaksi perekonomian, dan perjanjian perdagangan atau investasi secara bilateral maupun multilateral. Negosiasi yang dimaksudkan dapat berupa negosiasi tarif, kuota, investasi, lisensi ekspor-impor dan terkait hambatan dagang lainnya. Keterlibatan politik di sini menjadi poin penting, guna

¹² *Ibid*, 54.

¹³ Nicholas Bayne and Stephen Woolcock, *Op.Cit.*, 16.

¹⁴ Costas M. Constantinou, Pauline Kerr, dan Paul Sharp, *Op.Cit.*, 554-557.

mempengaruhi pihak lain, baik melalui keterlibatan positif (kerja sama pembangunan atau ekonomi) atau dengan cara yang tidak terlalu ramah seperti sanksi

2. Pembahasan

3.1 Dialog DPR RI Dengan Parlemen Uni Eropa

Di tahun 2017, sempat diadakannya pertemuan antara sejumlah anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dengan delegasi Parlemen Uni Eropa di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.¹⁵ Selaku Ketua BKSAP DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf menyatakan di hadapan delegasi Parlemen Uni Eropa bahwa Indonesia sendiri telah menjadi salah satu negara yang tentunya memiliki komitmen terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Di satu sisi, bahkan Nurhayati juga menegaskan jika Indonesia sendiri telah menjadi salah satu negara yang terdepan untuk ikut serta dalam meratifikasi rekomendasi *Paris Agreement* 21 mengenai perubahan iklim. Berikut pernyataan Nurhayati “ *Komitmen Indonesia terhadap perubahan iklim dan SDGs sangat jelas dan sudah diakui. Dalam memformulasikan sustainable development pun. Indonesia menjadi salah satu champion dalam pelestarian lingkungan*”.¹⁶

Pada kesempatan yang sama dalam pertemuan dengan delegasi Parlemen Uni Eropa, Nurhayati meminta kepada agar sekiranya resolusi sawit yang dikeluarkan Parlemen Uni Eropa tersebut dapat dibatalkan dengan mempertimbangkan komitmen Indonesia dalam pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, anggota BKSAP lainnya seperti Erico Sotarduga melakukan penyampaian di hadapan delegasi tersebut dengan menegaskan kembali jika industri kelapa sawit sendiri

¹⁵ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), “BKSAP Serukan Parlemen Uni Eropa Tinjau Ulang Resolusi Sawit”, 20 September 2022, internet (23 Mei 2017), <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/16522/t/BKSAP%20Serukan%20Parlemen%20Uni%20Eropa%20Tinjau%20Ulang%20Resolusi%20Sawit>

¹⁶ *Ibid.*

telah menampung sekitar 4 juta tenaga kerja Indonesia secara langsung.¹⁷

Oleh karenanya, jika benar terjadinya ada penghentian impor untuk minyak kelapa sawit Indonesia ke pasar Uni Eropa maka hal itu akan menimbulkan pula *multiplier effect* pada 12 juta rumah tangga. Erico Sotarduga juga menyampaikan di hadapan delegasi Parlemen Uni Eropa jika masalah deforestasi akibat industri kelapa sawit tidaklah perlu untuk dikhawatirkan. Erico kembali mengingatkan Uni Eropa jika luas *palm oil plantation* yang dibutuhkan hanya 6-7 persen dari luas Indonesia, sehingga hanya bisa efektif dengan 3 kali *replanting* dari lahan yang digunakan.¹⁸ Dalam penuturan ini, Erico Sotarduga meminta kepada delegasi Parlemen UE agar dapat mempertimbangkan kembali untuk bersikap adil kepada Indonesia. Seperti dalam penuturannya yang dikutip berikut “*Kami harap Uni Eropa berikan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia. Kelapa sawit makin baik ke depannya dan tidak berpengaruh masif terhadap kerusakan lingkungan*”.¹⁹

Pada kesempatan yang sama, anggota BKSAP lainnya seperti Hamdani juga ikut menyampaikan langsung kepada delegasi Parlemen UE, jika resolusi yang mereka keluarkan sendiri dianggap tidak berdasar disebabkan saran yang dianjurkan oleh Parlemen UE untuk menggunakan minyak *rapeseed* (kanola) dan minyak biji bunga matahari yang diketahui bahwa penggunaannya sendiri lebih tidak efisien serta dapat mengancam deforestasi yang lebih meluas. Hamdani juga mengingatkan kembali delegasi Parlemen UE bahwa ada sekitar 66.000 produk di Eropa yang tentunya masih sangat bergantung terutama pada minyak sawit.²⁰ Dalam menanggapi hal itu, Pedro Silva Pareira selaku salah satu Delegasi Parlemen Uni Eropa menampik pernyataan-pernyataan dari Indonesia dengan mengatakan jika pihak mereka berniat mengunjungi Provinsi Riau untuk mendapatkan

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

informasi yang akurat terkait hal ini.²¹ Pedro juga menyampaikan harapannya agar kedua pihak baik Parlemen Indonesia dan Parlemen Uni Eropa dapat melakukan pertemuan kembali selanjutnya dalam membahas hal ini.

Mengingat, jika resolusi sawit ini akan memiliki pengaruh yang juga berdampak kepada negosiasi perjanjian perdagangan di antara Indonesia dengan Uni Eropa. Maka, Pedro menuturkan pernyataan berikut seperti *“Kami percaya Indonesia dan Uni Eropa akan mendapatkan titik temu yang positif untuk pertumbuhan ekonomi kedua belah pihak”*.²² Pernyataan ini tentu mendorong sebuah harapan positif untuk Indonesia-Uni Eropa agar senantiasa dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang baik di kedua belah pihak. Adapun, delegasi berupa Tim Komite Perdagangan Internasional (INTA) Parlemen Uni Eropa ini melakukan serangkaian kunjungan ke Riau khususnya ke perkebunan sawit.²³ Kunjungan ini, ditunjukkan oleh delegasi Parlemen Uni Eropa untuk mendapatkan wawasan yang berkaitan dengan pengembangan kelapa sawit Indonesia. Sehingga di dalam kunjungan tersebut, juga melibatkan diskusi dengan koperasi petani kelapa sawit Indonesia, yang mana para petani kelapa sawit memberikan penjelasan secara langsung kepada delegasi tersebut. Penjelasan tersebut berupa upaya kerja sama swasta yang dilakukan petani kecil dengan tujuan untuk dapat mengembangkan kelapa sawit yang berkelanjutan.²⁴

Dengan berakhirnya kunjungan delegasi Parlemen Uni Eropa ke Riau, DPR RI menerima kunjungan delegasi Tim Komite Perdagangan Internasional (INTA) Parlemen UE. Delegasi tersebut menjelaskan bahwasannya resolusi Parlemen Uni Eropa tepatnya yang bertajuk *“Report on Palm Oil Deforestation of Rainforests”* sifatnya yaitu tidak

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ Antara News Kalsel, “Larangan Sawit Indonesia Masuk Eropa Bukan Hanya Karena Lingkungan” 23 September 2022, internet (24 Mei 2017), <https://kalsel.antaranews.com/rilis-pers/631113/larangan-sawit-indonesia-masuk-eropa-bukan-hanya-karena-lingkungan>.

²⁴ *Ibid.*

mengikat dan juga tidak berkekuatan hukum tetap.²⁵ Sehingga dalam pertemuan kedua delegasi berharap agar baik Parlemen UE dan DPR RI kedepannya dapat lebih sepakat jika Indonesia dan Uni Eropa dapat saling membutuhkan untuk segera menyelesaikan perundingan CEPA di tingkat Parlemen. Pada kesempatan yang sama, DPR RI juga menyampaikan dan memberikan pernyataan agar sekiranya Parlemen UE tidak perlu khawatir terutama terhadap perkembangan kelapa sawit di Indonesia. Hal itu diperjelas kembali oleh DPR RI jika Indonesia sudah berkomitmen untuk melaksanakan hasil kesepakatan COP 21 (Konferensi Perubahan Iklim) di Paris pada tahun 2015. Selain itu, DPR RI juga menegaskan bila Indonesia memang sejatinya sudah mengembangkan sertifikasi *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) dengan dijalankan secara wajib dan diterapkan di seluruh perkebunan sawit.²⁶

3.2 Negosiasi Bilateral Kementerian Luar Negeri Indonesia Dengan Kementerian Luar Negeri Italia

Selain melakukan dialog secara bilateral dengan Menteri Luar Negeri Belgia, Retno Marsudi yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia juga menyempatkan untuk melakukan pertemuan secara bilateral dengan Menteri Luar Negeri Italia saat itu yakni Angelino Alfano. Di tahun 2017, pertemuan bilateral ini dilangsungkan tepatnya pada tanggal 11 Oktober 2017 di Roma, Italia.²⁷ Diadakannya pertemuan bilateral dari kedua belah pihak ditujukan untuk dapat lebih memperkuat hubungan bilateral seperti dalam hal diplomasi maupun dalam hubungan ekonomi yang terjalin antara Indonesia-Italia. Lebih jelas, pertemuan bilateral ini juga difokuskan untuk dapat mendiskusikan isu yang menimpa minyak kelapa sawit. Dalam kehadirannya Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia saat itu,

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Antara News, "Indonesia-Italia Intensifkan Hubungan Bilateral di Berbagai Bidang", (10 Oktober 2017) internet, 23 September 2022, <https://www.antaranews.com/berita/657642/indonesia-italia-intensifkan-hubungan-bilateral-di-berbagai-bidang>.

menyampaikan jika Italia telah dianggap menjadi mitra yang begitu penting, khususnya di kawasan Uni Eropa salah satunya sebagai mitra dagang Indonesia yang berada dalam urutan 3 terbesar di Uni Eropa. Berikut kutipan yang diperoleh dari pernyataan Retno Marsudi “*Italia merupakan salah satu mitra penting Indonesia di Uni Eropa, Italia juga merupakan mitra dagang ketiga terbesar Indonesia di Uni Eropa*” begitu yang disampaikan Retno Marsudi di hadapan Alfano.²⁸

Retno Marsudi juga menekankan kembali pentingnya perlakuan yang adil terutama untuk dapat mencegah adanya tindakan diskriminasi terhadap industri dan produk yang dihasilkan dari kelapa sawit Indonesia. Tidak hanya menekankan pentingnya perlakuan adil terhadap industri kelapa sawit, Kementerian Luar Negeri Indonesia tersebut juga mengapresiasi negara tersebut di hadapan Pemerintah Italia pada pertemuan itu perihal Italia yang telah menjadi salah satu importir terbesar dari kelapa sawit Indonesia. Diplomat Indonesia itu menyebutkan “*Saya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Italia sebagai salah satu importir terbesar kelapa sawit Indonesia yang turut mendukung industri kelapa sawit di tanah air.*”²⁹ Dengan menyisipkan pesan penting lainnya, tidak lupa pihak Indonesia juga menegaskan kembali bila industri kelapa sawit sendiri telah meraih pengakuan dan perhatian yang besar yang menyangkut banyak hidup dari kurang lebih 20 juta penduduk Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan perlakuan adil yang diterapkan pada kelapa sawit agar industri ini diharapkan terhindar dari adanya tindakan diskriminatif, terutama dalam kasus ini di kawasan Uni Eropa.³⁰

Menurut Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Italia, Esti Andayani mengungkapkan bahwasannya Italia mendukung atas upaya yang dilakukan Indonesia untuk menggunakan minyak sawit terutama yang dimanfaatkan sebagai

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

salah satu bahan bakar nabati di pasar Uni Eropa (UE). Berikut ungkapan dari Esti “*Italia sejak awal selalu mendukung kami, baik di WTO (Organisasi Perdagangan Dunia), Uni Eropa, maupun Parlemen Uni Eropa*”.³¹ Ditambahkan oleh Esti Andayani, bila sejatinya alasan Pemerintah Italia mendukung upaya Indonesia dalam mendorong minyak sawit untuk digunakan sebagai salah satu bahan bakar nabati di pasar Uni Eropa juga karena Italia sendiri memang menggunakan minyak sawit di dalam produknya. Adapun untuk produk itu sendiri baik pada produk makanan maupun kosmetik. Selain itu, Presiden Ferrero Rocher juga menyampaikan kepada Duta Besar Indonesia untuk Italia jika mereka masih akan terus menggunakan minyak sawit.³²

Hal itu dikarenakan hasil penelitian yang telah mereka lakukan dan uji sendiri tidak menunjukkan indikasi bila minyak sawit tergolong bahaya bagi kesehatan manusia. Esti Andayani mengatakan “*Mereka (Ferrero Rocher) akan terus menggunakan minyak sawit. Dengan melakukan penelitian, mereka membuktikan bahwa orang yang mengatakan minyak sawit tidak sehat adalah pembohong. Perusahaan menang di pengadilan melawan hoax tersebut*” begitu ujarnya yang disampaikan Esti Andayani.³³ Oleh karena itu, dari data yang didapatkan, Pemerintah Italia masih akan terus bekerja sama dengan Pemerintah Italia beserta Ferrero Rocher untuk perihal melawan upaya larangan yang ditujukan untuk penggunaan minyak kelapa sawit, tepatnya di Uni Eropa. Kemudian, melalui beberapa kementerian Italia, Indonesia sungguh mengapresiasi upaya Pemerintah Indonesia untuk terus mendukung perjuangan Indonesia dalam hal melawan kampanye hitam terhadap minyak sawit di Uni Eropa.³⁴

2.3. Dialog Indonesia dengan Uni Eropa di Pertemuan *Trade Diplomacy Review (TPR)*

³¹ Antara News, “*Italy Backs Indonesia’s Palm Oil in EU*”, (14 Februari 2018) internet, 23 September 2022, <https://en.antaranews.com/news/114622/italy-backs-indonesias-palm-oil-in-eu>.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

Sebagai salah satu produsen terbesar kelapa sawit di dunia, selaku pelaku bisnis, pengusaha kelapa sawit Indonesia tentunya menjadi salah satu aktor yang terdepan dalam mendukung upaya pemerintah Indonesia terutama dalam melawan apa yang dilancarkan Parlemen Uni Eropa seperti kampanye hitam terhadap produk sawit yang tak hentinya digencarkan oleh Parlemen UE, diikuti dengan tuduhan yang tidak berdasar serta dianggap juga akan sangat merugikan banyak dari pengusaha Indonesia. Kutipan langsung yang diucapkan oleh Agus Purnomo selaku *Managing Director Sustainability and Strategic Stakeholder Engagement Golden Agri-Resources (GAR)* saat itu mengungkapkan jika meskipun belum ada dampak negatif yang muncul dari kampanye hitam terhadap produk sawit ini, namun perlu diperhatikan agar hal itu tidak dibiarkan saja, terutama jika banyak dari masyarakat Uni Eropa akan memiliki pemikiran yang negatif terhadap sawit, itu juga akan merugikan industri kelapa sawit dan aktor-aktor yang berperan penting di dalamnya seperti pengusaha dan petani sawit, dan akan berpengaruh buruk pada perekonomian Indonesia.

Berikut ucapan langsung dari Agus Purnomo “*Memang sejauh ini belum ada dampak negatif dari gencarnya kampanye hitam produk sawit. Tapi hal itu tidak bisa dibiarkan karena kalau masyarakat Uni Eropa memiliki pemikiran yang salah soal sawit maka untuk jangka panjang akan merugikan juga*” kata Agus Purnomo.³⁵ Agus juga menambahkan, bahwa bila memang ingin memungkinkannya melawan kampanye hitam terhadap produk sawit ini, tidak bisa dilakukan dari masing-masing aktor yang berperan penting di dalamnya. Namun, perlu koordinasi atau perlu dilakukan secara bersama-sama melalui asosiasi dan pemerintah dengan mengupayakan negosiasi dengan parlemen setempat. Ditambahkan oleh Agus juga, keinginan yang muncul dari para pengusaha dan pemerintah sendiri yaitu dapat

³⁵ Antara News, “Pengusaha Dukung Pemerintah Lawan Kampanye Hitam Sawit Indonesia”, (18 Juli 2017) internet, 23 September 2022, <https://www.antarane.ws.com/berita/641054/pengusaha-dukung-pemerintah-lawan-kampanye-hitam-sawit-indonesia>.

menuntut masalah ini dengan sistem perdagangan bebas dan berkeadilan, mengingat hal itu yang sebetulnya memang perlu diterapkan dari semua anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Kata *Managing Director Sustainability and Strategic Stakeholders Engagement Golden Agri-Resources* (GAR) mengatakan “Kalaupun ada perusahaan sawit yang masih belum melakukan hal yang sesuai ketentuan maka perusahaan itulah yang harus diperbaiki. Jangan sampai semua perusahaan sawit di Indonesia kena tuduhan kampanye hitam”.³⁶

Pada tanggal 5 Juli tahun 2017, pertemuan *Trade Policy Review* (TPR) yang ke-13 dihadiri oleh Delegasi Indonesia.³⁷ Dengan hadirnya Delegasi Indonesia, tujuan yang ingin disampaikan juga terhadap UE untuk dapat memperhatikan bahwa telah terjadi peningkatan atas hambatan perdagangan khususnya untuk kelapa sawit sebagai produk impor dari Indonesia, hal ini merupakan dampak dari penerapan hambatan dagang yang dilakukan oleh Uni Eropa. Saat pertemuan ini dilangsungkan di awal bulan Juli tahun 2017 tersebut, Dody Edward yang kala itu sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional pada Kementerian Perdagangan di hadapan delegasi Uni Eropa menuturkan jika salah satu pemasok terbesar minyak sawit untuk yaitu Indonesia Dody juga mengutarakan bahwa ini sungguh sangat kecewa dengan terjadinya peningkatan hambatan perdagangan secara signifikan terhadap ekspor minyak sawit Indonesia ke UE. Dalam pernyataan langsung yang dikemukakan Dodi Edward seperti berikut, “Indonesia adalah pemasok terbesar minyak sawit untuk UE, dan oleh karenanya sangat menyedihkan terjadinya peningkatan hambatan perdagangan terhadap ekspor minyak sawit Indonesia ke UE.”³⁸

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “Indonesia Mempermasalahkan Kebijakan Perdagangan Uni Eropa yang Menghambat Ekspor Minyak Sawit dan Produk Asal Indonesia”, (06 Juli 2017) internet, 24 September 2022, <https://kemlu.go.id/jenewa-un/id/news/692/indonesia-mempermasalahkan-kebijakan-perdagangan-uni-eropa-yang-menghambat-ekspor-minyak-sawit-dan-produk-asal-indonesia>.

³⁸ *Ibid.*

Selain menyuarakan ungkapan tersebut, Delegasi Indonesia juga menyampaikan keprihatinannya atas munculnya Resolusi Sawit dan Deforestasi (*Resolution on Palm Oil and Deforestation of Rainforest*) yang diciptakan oleh Parlemen Uni Eropa yang di dalamnya terdapat unsur-unsur yang mengaitkan kepada diskriminasi terhadap produk minyak sawit dan produk minyak nabati lainnya. Sehingga Dody Edward juga berpendapat, bila Uni Eropa diminta untuk dapat mengakui upaya yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia pertama-tama dari pengelolaan serta promosi yang diupayakan secara intensif terhadap produksi minyak sawit yang berkelanjutan. Berikut ungkapan yang disampaikan Dody Edward, “Resolusi tersebut tidak tepat, dan UE perlu mengakui upaya keras Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan dan mempromosikan produksi minyak sawit yang berkelanjutan”, begitu yang diutarakan Dody Edward.³⁹ Kehadiran Delegasi Uni Eropa dalam pertemuan TPR yang ke-13 ini kemudian menyampaikan di hadapan langsung Delegasi Indonesia, jika Resolusi Sawit dan Deforestasi Hujan yang dikeluarkan Parlemen Uni Eropa tidaklah mengikat terhadap badan eksekutif Komisi Eropa. Sehingga, Uni Eropa memperjelas kembali pernyataan tersebut dengan menyampaikan bila secara hukum tidak mengharuskan Komisi Eropa untuk menindaklanjuti dari apa yang Parlemen Uni Eropa tersebut telah rancang mengenai resolusi tersebut sebagai suatu produk hukum yang mengikat.⁴⁰

1.6.4 Indonesia Melakukan Lobi Ke Vatikan

Luhut Binsar Pandjaitan selaku Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (Menko Maritim) melakukan pertemuan secara bilateral dengan Kardinal Peter Turkson yang saat itu menjabat sebagai Lembaga Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian di Kota Vatikan pada 25 April 2018.⁴¹ Pertemuan kedua tokoh penting ini, memiliki tujuan tersendiri terutama bagi Pak Luhut.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Majalah Sawit Indonesia, “Berkunjung ke Vatikan, Menko Luhut Sampaikan Peranan Sawit Pangkas Kemiskinan”, (26 April 2018) internet, 24 September 2022, <https://sawitindonesia.com/berkunjung-ke-vatikan-menko-luhut-sampaikan-peranan-sawit-pangkas-kemiskinan/>.

Sebagaimana beliau meminta dukungan kepada Kardinal Peter Turkson agar sawit tidak dilarang untuk masuk ke Uni Eropa. Menko Luhut sempat menyampaikan bila Kardinal Turkson sungguh prihatin dengan apa yang terjadi atas munculnya Resolusi Sawit dan Deforestasi Hujan Parlemen Uni Eropa. Beliau dikatakan Pak Luhut begitu peduli dengan nasib para petani sawit yang tercatat ada lebih dari jutaan orang menggantungkan hidupnya pada industri sawit ini. “*Beliau secara khusus menyatakan apa yang akan terjadi jika mereka ini yang sebagian besar muslim tidak mempunyai penghasilan lagi. Karena itu, Kardinal Turkson menggagas untuk mengadakan seminar yang membicarakan hal ini di Universitas Kepausan di Vatikan*”, ujar Menko Luhut selepas bertemu dengan Kardinal Turkson.⁴²

Pada tanggal 15 Mei 2018, tepatnya di *Pontifical Urban University* Vatikan, di Kota Roma, Ibu Kota Italia, Menko Maritim Luhut Pandjaitan mendatangi seminar yang digagas oleh Kardinal Turkson.⁴³ Kunci utama yang dibahas dari seminar ini yaitu “Pemberantasan Kemiskinan Melalui Pertanian dan Perkebunan Demi Perdamaian dan Kemanusiaan”.⁴⁴ Di awal pidato, Pak Luhut, mengucapkan apresiasinya kepada beberapa pihak seperti Malaysia dan *Dicastery for Promoting Integral Human Development* yang di bawahi secara langsung dari kepemimpinan Kardinal Peter Turkson. Yang mana telah memfasilitasi serta mengadakan perhelatan seminar ini di Roma, Italia.⁴⁵ Diadakannya seminar ini telah menjadi forum penting sebagai sarana dalam bertukar pikiran dan berdialog di antara para pemangku kepentingan yang terdiri dari perwakilan pemerintah, maupun organisasi non-pemerintah, akademisi, dan pengusaha agrikultural dan sawit.⁴⁶ Tidak lepas, seminar ini juga tentunya dapat dihadiri oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil. Hadirnya Menko Maritim Luhut

⁴² *Ibid.*

⁴³ PT. Propadu Konair Tarahubun (PT PKT), “Seminar di Vatikan : Perkebunan Kelapa Sawit Bisa Memangkas Kemiskinan”, (16 Mei 2018) internet, 24 September 2022, <https://sawitindonesia.com/berkunjung-ke-vatikan-menko-luhut-sampaikan-peranan-sawit-pangkas-kemiskinan/>.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

pada kesempatan ini juga turut menyebutkan peranan penting dan murni yang dimiliki Vatikan dalam konferensi internasional ini sebagai fasilitator yang murni dalam memaparkan fakta yang lengkap terkait isu yang dibahas secara signifikan yaitu industri kelapa sawit namun dari sudut pandang kemanusiaan dan pengurangan kemiskinan. Pak Luhut sendiri menuturkan pernyataan seperti berikut ini, *“Kami (Pemerintah Indonesia) tidak ada maksud sama sekali untuk menggunakan Vatikan dan bertentangan dengan pihak manapun”* begitu yang diucapkan beliau secara resmi.⁴⁷

Begitu demikian, Luhut Binsar Pandjaitan menambahkan fakta penting di hadapan para hadirin mengenai ada sekitar 2,1 juta petani Indonesia yang bekerja pada industri kelapa sawit sebagai salah satu sumber pencaharian dalam menopang hidupnya. Lantas juga diiringi dengan fakta lain yang sajikan Pak Luhut seperti total dari 11,6 juta hektar perkebunan kelapa sawit di Indonesia, maka sebesar 41% -nya merupakan perkebunan rakyat. Inilah keterangan resmi yang dituturkan beliau, *“Dari total 11,6 juta hektar perkebunan kelapa sawit Indonesia, 41% di antaranya adalah perkebunan rakyat. Ada 2,1 juta petani kelapa sawit di Indonesia”*, kata Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Indonesia tersebut.⁴⁸ Ditambahkan pula oleh beliau, sekitar EUR 15,1 miliar atau dalam kurs Indonesia lebih dari 250 triliun merupakan angka yang telah disumbangkan kelapa sawit teruntuk devisa ekspor Indonesia. Maka itu, salah satu tulang punggung terbesar dan terpenting bagi perekonomian nasional ialah sektor pertanian, seperti industri kelapa sawit. Masih dari pernyataan yang diutarakan Pak Luhut, Beliau juga menyatakan, ada sebesar 17,5 juta merupakan tenaga kerja yang diserap langsung dari masyarakat Indonesia, yang kemudian pula bekerja baik secara langsung maupun tidak langsung di sektor kelapa sawit. *“Dari aspek penyerapan tenaga kerja, ada 17,5 juta masyarakat Indonesia yang bekerja baik langsung*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), “VATIKAN : Perkebunan Kelapa Sawit Entaskan Kemiskinan”, (16 Mei 2018) internet, 24 September 2022, <https://gapki.id/news/2018/05/16/vatikan-perkebunan-kelapa-sawit-entaskan-kemiskinan/>.

maupun tidak langsung di sektor kelapa sawit”, berikut ujar Pak Luhut.⁴⁹

Di sela-sela Pak Luhut berkesempatan berbicara pada seminar internasional ini, tokoh utama lain yang juga telah hadir. Seperti di antaranya ialah Tan Sri Bernard Giluk Dompok yang juga menjabat sebagai Duta Besar Malaysia untuk Vatikan, disertai dengan kehadiran Kardinal Peter KA. Selain hadirnya Turkson (Direktur Lembaga Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian), turut hadir Alberto Trevisial (Rektor *Pontifical Urban University*), dan tak lupa, terdapat Duta besar RI untuk Jerman yaitu Arif Havas Oegroseno.⁵⁰ Disambung dengan Tan Sri Bernard Giluk Dompok, bahwa sama halnya dengan Indonesia, Malaysia juga begitu bertumpu pada budidaya kelapa sawit dalam akses pertumbuhan ekonomi mereka. Sehingga, Tan Sri juga menyambung, kelapa sawit tidak hanya menopang bagi pertumbuhan ekonomi saja, namun juga sebagai sarana *social inclusion* dan *environment protection*. Dalam penuturannya, *“Tahun 2017 lalu, kami sudah 100 tahun melakukan budidaya kelapa sawit, Sektor kelapa sawit tidak saja menopang pertumbuhan ekonomi, tetapi sarana social inclusion dan environment protection”*.⁵¹ Penting untuk diperhatikan ucap beliau, bila produktivitas tinggi yang dicapai minyak nabati memang diperoleh 10 tinggi oleh minyak sawit dibandingkan soybean dan produktivitas ini juga empat kali lebih tinggi dari bunga matahari.

Tan Sri menyisipkan pesan lain yaitu bila ingin mengupayakan menahan laju deforestasi, maka kelapa sawit menjadi pilihan tanaman yang memungkinkan untuk dikembangkan. Ujarnya, dalam pertanyaan ini, *“Jika dunia menahan laju deforestasi, maka kelapa sawit adalah tanaman yang paling mungkin dikembangkan. Sawit efektif menekan emisi gas rumah kaca”* tutur Tan Sri.⁵² Setelah, itu, disambung oleh Kardinal Peter KA. Turkson yang menyampaikan salah satu sektor seperti perkebunan kelapa sawit tentu dapat menjadi

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

usaha untuk dapat mengurangi faktor kemiskinan. Ditambahkan pula oleh Peter, perlu adanya keseimbangan yang terjaga di antara kegiatan ekonomi dengan pengelolaan lingkungan. Penuturan langsung dari Peter juga menambahkan “*Namun harus dijaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi dengan pengelolaan lingkungan*” tutur beliau.⁵³

3. Kesimpulan

Dalam kurun waktu 2017-2018 Indonesia melakukan upaya diplomasi ekonomi, untuk memperjuangkan ekspor CPO (*Crude Palm Oil*) ke pasar Uni Eropa atas munculnya resolusi sawit Uni Eropa yang mengusulkan kepada Komisi Eropa untuk mengambil langkah penghentian penggunaan minyak kelapa sawit pada tahun 2020. Upaya diplomasi ekonomi dengan melakukan pendekatan secara bilateral. Ini dimulai dari dialog oleh DPR RI dengan Parlemen Uni Eropa, negosiasi bilateral Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan Kementerian Luar Negeri Italia, dialog Indonesia dengan Uni Eropa di Pertemuan *Trade Diplomacy Review* (TPR), dan terakhir yaitu dengan Indonesia melakukan Lobi Ke Vatikan.

⁵³ *Ibid.*

Daftar Pustaka

- Antara News. "Indonesia-Italia Intensifkan Hubungan Bilateral di Berbagai Bidang". 10 Oktober 2017 internet. 23 September 2022 <www.antaraneews.com>.
- Antara News. "Italy Backs Indonesia's Palm Oil in EU". 14 Februari 2018 internet. 23 September 2022 <www.antaraneews.com>.
- Antara News Kalsel. "Larangan Sawit Indonesia Masuk Eropa Bukan Hanya Karena Lingkungan". 24 Mei 2017 internet. 23 September 2022 <www.kalsel.antaraneews.com>.
- Antara News. "Pengusaha Dukung Pemerintah Lawan Kampanye Hitam Sawit Indonesia". 18 Juli 2017 internet. 23 September 2022 <www.antaraneews.com>.
- Bayne, Nicholas dan Stephen Woolcock. *The New Economic Diplomacy Decision-Making and Negotiation in International Economic Relations* . Hampshire: Ashgate Publishing Limited, 2003.
- Constantinou, Costas M., Pauline Kerr dan Paul Sharp. *The SAGE Handbook of Diplomacy* . London: SAGE Publication Ltd, 2016.
- Detikcom. "Ekspor Sawit ke Eropa Dihambat, Apa Dampaknya Bagi RI?". 18 April 2017 internet. 05 Desember 2022 <www.finance.detik.com>.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. "BKSAP Serukan Parlemen Uni Eropa Tinjau Ulang Resolusi Sawit". 23 Mei 2017 internet. 20 September 2022 <www.dpr.go.id>.
- Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. "Sumatra-Kalimantan Jadi Sentra Sawit Nasional". 11 Desember 2011 internet. 04 Desember 2022 <www.disbun.kaltimprov.go.id>.
- European Parliament. "Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests". 17 Maret 2017 internet. 06 April 2022 <www.europarl.europa.eu>.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). "VATIKAN : Perkebunan Kelapa Sawit Entaskan Kemiskinan". 16 Mei 2018 internet. 24 September 2022 <www.gapki.id>.

Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. "Indonesia Mempermasalahkan Kebijakan Perdagangan Uni Eropa yang Menghambat Ekspor Minyak Sawit dan Produk Asal Indonesia". 06 Juli 2017 internet. 24 September 2022 <www.kemlu.go.id>.

Kementrian Pertanian RI. "Devisa Ekspor Kelapa Sawit Capai 250 Trilyun". t.thn. 04 April 2022 <www.pertanian.go.id>.

Kompas. "Indonesia Sebagai Negara Agraris Apa Artinya?". 12 Desember 2019 internet. 20 April 2022 <www.kompas.com>.

Majalah Sawit Indonesia. "Berkunjung ke Vatikan, Menko Luhut Sampaikan Peranan Sawit Pangkas Kemiskinan". 26 April 2018 internet. 24 September 2022 <www.sawitindonesia.com>.

Masruroh, Siti. "'Kepentingan Amerika Serikat Menolak Impor CPO (Crude Palm Oil) Dari Indonesia Tahun 2012'." *JOM FISIP*, Vol. 4 No. 2 (2012): 1-18.

PT. Propadu Konair Tarahubun (PT PKT). "Seminar di Vatikan : Perkebunan Kelapa Sawit Bisa Memangkas Kemiskinan". 16 Mei 2018 internet. 24 September 2022 <www.pkt-group.com>.

PT. Tunas Harapan Sawit. "Minyak Kelapa Sawit". t.thn. 20 April 2022 <www.tunasharapansawit.com>.